

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang kini masih melanda masyarakat pe -  
desaan Indonesia harus dipandang sebagai masalah nasional  
yang besar (Thee Kian Wie, 1983:18). Masalah kemiskinan  
di pedesaan ini dinilai oleh Astrid S. Susanto (1984:83)  
sebagai masalah utama, dipandang oleh Kartini Kartono  
(1986:3) sebagai masalah kritis gawat, dan ditegaskan oleh  
Soepardjo Adikusumo (1988:71) sebagai masalah fundamental.  
Kemiskinan sebagai ketiadaan kemampuan seseorang untuk  
memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokoknya (Ath-Thawil,  
1985:36) bisa berbentuk relatif maupun absolut (Soedjatmo-  
ko, 1984:157). Kemiskinan relatif merupakan suatu keadaan  
yang menunjukkan tingkat pendapatan seseorang relatif  
tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Kemiskinan  
absolut menunjukkan tingkat pendapatan mutlak seseorang  
tidak mencukupi kebutuhan pokoknya (Kindervatter, 1979:1;  
Arndt, 1983:57). Besarnya dimensi masalah kemiskinan  
absolut ini tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat  
pendapatan dan konsumsinya berada di bawah "garis ke -  
miskinan" (tingkat hidup minimal). Walaupun golongan  
petani kaya atau sebagian dari petani sedang telah dapat  
ditingkatkan pendapatannya, namun bagian terbesar dari  
petani di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan

(Dawam Rahardjo, 1984:278; Siagian, 1984:129).

Pendapatan bagian terbesar dari petani di pedesaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya membuat mereka sebagai golongan yang kekurangan uang (Ath-Thawil, 1985:73) sehingga terperangkap dalam kondisi hidup yang serba kurang. Mereka masih diliputi kekurangan dalam bidang sandang, papan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi, kesejahteraan sosial, harga diri, kualitas kerja, modal, luas tanah, sumber alam, keterampilan, kondisi jasmaniah, kondisi rohaniah, dan lingkungan hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan (Emil Salim, 1980:76; Sanapiah Faisal, 1981:4). Kondisi kehidupan mereka seperti ini telah membuat mereka "hidup bersama" dengan ketuna - aksaraan, penyakit (UNESCO, 1978:89), dan kebodohan (Napi - tupulu, 1980:8). Mereka bodoh karena mereka hidup serba kurang. Mereka hidup serba kurang karena mereka miskin. Mereka miskin karena mereka bodoh. Kemiskinan, kebodohan, dan kehidupan serba kurang, dengan demikian, merupakan lingkaran derita yang mencekam bagian terbesar dari kaum tani di pedesaan, yang oleh Tafal (1982:1) dinamakan sebagai "kaum papa pedesaan" atau sebagai "kaum yang tidak berdaya", meminjam istilah Illich (1984:13). Kaum tani yang kehidupannya seperti inilah disebut oleh Korten (1984:19) sebagai dinamika kemiskinan yang paling pahit di pedesaan. Karena itu Galbraith (1983:2) menegaskan bahwa kemiskinan itu merupakan biang keladi derita yang berkelanjutan.

Aneka ragam usaha untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan kehidupan yang serba kurang, yang masih mencekam bagian terbesar kaum tani di pedesaan, sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, baik melalui jalur pembangunan fisik maupun jalur pendidikan. Usaha melalui jalur pendidikan ditempuh melalui pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah (PLS). Usaha melalui jalur PLS yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan melalui berbagai departemen dengan cara membentuk bagian yang bertanggungjawab melaksanakan program PLS bagi warga masyarakat. Program-program PLS yang kini diluncurkan kepada masyarakat pedesaan, termasuk kepada kaum tani, dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Penerangan, dan Departemen Pertanian (Sanapiah Faisal dan Abdillah Hanafi, 1982:411-412; Sudjana, 1988:13-16; Sutaryat Trisnamansyah, 1988:12-13). Selain departemen-departemen ini, lembaga atau organisasi masyarakat dan perorangan menyelenggarakan pula program PLS di masyarakat pedesaan.

Program-program PLS yang diluncurkan oleh Departemen Pertanian kepada masyarakat petani di antaranya (1) penyuluhan pertanian multimedia; (2) kursus pemberantasan

hama; (3) kursus kontak tani; (4) kursus tani desa; (5) kursus taruna tani; (6) kursus wanita tani; dan (7) pembinaan kelompok belajar usaha tani. Usaha pendidikan pertanian ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat petani dalam mengelola dan mengembangkan usahanya dan dijadikan penunjang utama, di samping usaha penelitian dan pengembangan, terhadap keberhasilan pembangunan pertanian (MPR RI, 1988:42). Dengan perkataan lain usaha pendidikan pertanian dijadikan salah satu strategi dasar untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, yaitu (1) meningkatkan hasil dan mutu produksi; (2) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; (3) memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) menunjang pembangunan industri; dan (5) meningkatkan ekspor (MPR RI, 1988:39).

Penyuluhan pertanian, sebagai salah satu kegiatan atau bentuk PLS, sudah dimulai di Indonesia di sekitar tahun 1908 (BLPP, 1978) pada masa penjajahan Belanda dan bangkitnya pergerakan kebangsaan. Penyuluhan pertanian pada masa itu diarahkan kepada peningkatan produksi pertanian yang relatif menguntungkan penjajah Belanda. Penyuluhan pertanian oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan di sekitar tahun 1950 dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian melalui rencana induk yang dikenal dengan nama "Rencana Kasimo". Titikberat dari rencana ini diletakkan pada penyediaan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan pemberian kredit kepada petani. Rencana

ini mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya sehingga di -  
hentikan oleh pemerintah pada tahun 1955. Penyuluhan per -  
tanian kemudian diarahkan untuk mendukung pelaksanaan  
program baru yang dikenal dengan nama "Program Padi Sentra"  
yang dimulai pada tahun 1959. Tujuan dari program ini  
serupa dengan tujuan "Rencana Kasimo", yaitu swasembada  
pangan, khususnya padi, dengan menitikberatkan kepada  
penyediaan sarana produksi berupa pupuk, bibit unggul, dan  
kredit. Namun pengembalian kredit dari petani relatif  
sulit sehingga akhirnya program ini dihentikan pula oleh  
pemerintah pada tahun 1962.

Memasuki masa Orde Baru sejak Repelita I pemerintah  
mengembangkan suatu program baru yang dikenal dengan nama  
"Program Bimas". Tujuan dari program ini adalah untuk  
mencapai tingkat swasembada pangan. Sasaran utama dari  
program ini adalah (1) penyediaan bibit unggul, pupuk, dan  
pestisida; (2) pelaksanaan intensifikasi dalam pertanian ;  
(3) perbaikan dan pembuatan prasarana baru, seperti pengair-  
an, dan sejenisnya; dan (4) pemberian kredit kepada petani.  
Penyuluhan pertanian untuk mendukung keberhasilan dari  
program ini diarahkan kepada peningkatan pengetahuan, sikap,  
dan kemampuan masyarakat petani dalam mengelola dan me -  
ngembangkan usaha taninya dengan menerapkan teknologi per -  
tanian yang baru. Teknologi pertanian yang pertama dikenal-  
kan dalam program ini melalui kegiatan penyuluhan pertanian  
adalah teknologi produksi Paket A yang menekankan kepada

teknologi Panca Usaha Tani, yaitu (1) pengolahan tanah yang baik; (2) penggunaan bibit unggul; (3) pemupukan; (4) pengairan yang baik; dan (5) penggunaan pestisida. Karena terjadi perkembangan dalam teknologi bidang pertanian maka melalui penyuluhan pertanian kemudian diperkenalkan pula kepada masyarakat petani teknologi produksi Paket B dan kemudian teknologi produksi Paket C. Teknologi produksi Paket B merupakan teknologi produksi Paket A ditambah pemupukan berimbang dan penggunaan benih bersertifikat. Teknologi Paket C adalah teknologi produksi Paket B ditambah penertiban pola tanam tahunan. Penyuluhan pertanian teknologi produksi Paket A, Paket B, dan Paket C ini tetap berjalan sampai sekarang di setiap kabupaten, kecamatan, dan desa yang tidak termasuk lokasi teknologi produksi Pola Supra Insus.

Walaupun para petani responsnya relatif baik terhadap teknologi produksi Paket A, Paket B, dan Paket C, namun tetap ada masalah-masalah yang dapat meresahkan masyarakat Indonesia (PPPPP, 1987:3-5). Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan merupakan penyumbang utama terhadap penyediaan beras nasional. Pengairan pesawahan di beberapa kabupaten di enam propinsi ini dapat terjamin, baik pada musim gadu maupun pada musim rendeng. Hamparan pesawahannya memungkinkan untuk dilaksanakannya kerjasama antar kelompok tani yang lebih intensif. Namun produktivitas yang telah dicapai

(1986) rata-rata sekitar 45,30 kuintal gabah kering giling per hektar. Tingkat produktivitas sebesar ini dengan tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat dapat mengancam kelestarian swasembada pangan dan penyediaan beras nasional serta menekan pendapatan kaum tani yang masih terjerat dalam kemiskinan itu. Keresahan-keresahan inilah yang mendorong munculnya teknologi produksi Paket D Pola Supra Insus. Dengan teknologi ini tingkat produktivitas yang telah dicapai masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan minimal 1,5 ton gabah kering giling per hektarnya.

Teknologi produksi Paket D, yang merupakan teknologi produksi Paket C ditambah penggunaan pupuk pelengkap cair Sitozim maupun bukan Sitozim dan penggunaan zat pengatur tumbuh Hidrosil dan Dharmasri, diperkenalkan kepada masyarakat petani melalui penyuluhan pertanian pada tahun 1987. Teknologi produksi Paket D ditambah dengan penggunaan pupuk pelengkap cair atau penggunaan zat pengatur tumbuh saja dikenal sebagai teknologi produksi pola Supra Insus. Teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat petani yang ada pada beberapa kabupaten tertentu saja yang ada di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan. Penyuluhan pertanian multimedia mengenai teknologi produksi pola Supra Insus di enam propinsi ini dimulai sekitar pertengahan tahun 1987 menjelang datangnya musim rendeng di akhir tahun tersebut. Ide teknologi produksi pola Supra Insus ini bukan merupakan ide yang sama-

sekali baru, tetapi lebih merupakan peningkatan dari Paket A atau dari paket "Intensifikasi Pertanian" yang dikenal sejak tahun 1966.

Di Jawa Barat teknologi produksi pola Supra Insus ini dilaksanakan di enam kabupaten yang ada di pantai Utara, yaitu kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Karena itu keenam kabupaten ini dalam Supra Insus dinamakan daerah "Opsus Jalur Pantura" (Operasi Khusus Jatiluhur Pantai Utara). Sasaran areal tanaman padi Supra Insus luasnya 342.000 hektar dengan rincian kabupaten Tangerang 30.000 hektar, Bekasi 43.000 hektar, Karawang 85.000 hektar, Subang 75.000 hektar, Indramayu 91.000 hektar, dan Cirebon 18.000 hektar. Keenam kabupaten ini dinilai sangat potensial untuk menjadi pelopor dan teladan dalam melaksanakan peningkatan produksi padi pola Supra Insus, mengingat adanya sumber pengairan Jatiluhur yang dapat mengairi pesawahan secara teratur, baik pada musim gadu maupun pada musim rendeng. Produktivitas per hektar (1986) gabah kering giling di kabupaten Tangerang 42,80 kuintal; di kabupaten Bekasi 44,29 kuintal; di kabupaten Karawang 48,02 kuintal; di kabupaten Subang 47,87 kuintal; di kabupaten Indramayu 46,58 kuintal; dan di kabupaten Cirebon 48,38 kuintal. Dengan tingkat produktivitas seperti ini dan jumlah penduduk Jawa Barat yang cenderung akan terus meningkat maka (1) kelestarian swasembada pangan, khususnya beras, di Jawa Barat akan terancam; (2) peningkat-

an pendapatan petani dan keluarganya akan terhambat; dan (3) sumbangan Jawa Barat untuk penyediaan beras nasional akan terganggu. Keresahan-keresahan ini dapat diatasi dengan penerapan teknologi produksi pola Supra Insus, sebab dengan teknologi ini produktivitas di daerah Opsus Jalur Pantura masih memungkinkan untuk ditingkatkan minimal mencapai 9 ton gabah kering panen atau 6,63 ton gabah kering giling per hektar.

Peserta Supra Insus pada tahun 1987 di daerah Opsus Jalur Pantura Jawa Barat ini adalah para petani warga kelompok tani yang tergabung dalam 12.222 kelompok tani yang tersebar pada 755 Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP). Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), sebagai petugas yang berhadapan langsung dengan para petani warga kelompok tani dalam melaksanakan program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus, berjumlah 817 orang. PPL yang dijadikan ujung tombak dalam pelaksanaan program penyuluhan ini didukung oleh 68 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), 142 orang petugas Pengamat Hama, 128 orang Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP), dan 12 orang Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS). Di samping PPL, pelaksanaan program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus ini dilakukan pula melalui media berupa brosur, leaflet, poster, majalah, surat kabar, radio, dan televisi. Materi dari program penyuluhan pertanian ini mengacu kepada sepuluh unsur teknologi produksi pola Supra Insus, yaitu : (1) peng-

gunaan benih unggul yang bersertifikat dan tahan hama wereng coklat dengan pengutamakan padi jenis IR 48 dan IR 64; (2) pengolahan tanah secara sempurna dengan traktor, traktor, atau tenaga pencangkul; (3) pengaturan jarak tanam dengan ukuran 22 cm x 22 cm pada musim gadu dan 30 cm x 15 cm pada musim rendeng dengan jumlah tiga anak padi setiap rumput; (4) pemupukan berimbang antara Urea, TSP, ZA, dan KCL dengan ancer-ancer dosis per hektar 250 kg Urea, 125 kg TSP, 100 kg ZA, dan 100 kg KCL; (5) penggunaan pupuk pelengkap cair Sitozim sebanyak 0,5 liter per hektar; (6) penggunaan air secara sangkil (efisien) di tingkat usaha tani dengan cara mengatur tinggi genangan air di petakan yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan perkembangan pertumbuhannya; (7) pengendalian hama secara terpadu (PHT) yang dilaksanakan mulai dari persemaian sampai selesai panen; (8) penanganan kegiatan pasca panen dan pemasaran hasil secara baik; (9) penggiliran varietas padi antar musim tanam dan antar kelompok tani; dan (10) penerapan pola tanam tahunan dengan pola tanam padi-padi-palawija (BIP Jawa Barat, 1987: 8-12).

Penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di daerah Opsus Jalur Pantura, di enam kabupaten, mulai dilaksanakan di sekitar bulan Agustus 1987, yang berpijak pada Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat / Ketua Satuan Pembina Bimas Nomor 521.21/Inst 1526 - Binprod / 1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang

"Peningkatan Produksi Padi Pola Supra Insus Opsus Jalur Pantura di Jawa Barat". Penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus ini, yang diasumsikan sebagai sistem PLS bagi para petani, bertujuan agar para petani mampu memperbaiki dan meningkatkan usaha taninya dengan menerapkan semua unsur teknologi produksi pola Supra Insus sehingga pendapatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya meningkat. Sampai sejauh mana pengaruh dari pelaksanaan program penyuluhan pertanian ini terhadap kegiatan usaha tani para petani dapat ditelusuri dari dimensi responsnya terhadap teknologi produksi pola Supra Insus. Bagaimana respons petani warga kelompok tani terhadap teknologi produksi pola Supra Insus dijadikan ajang penelitian dalam studi ini.

#### B. Pembatasan Masalah

Untuk mengetahui sampai sejauh mana respons petani warga kelompok tani terhadap teknologi produksi pola Supra Insus, yang dipandang sebagai dampak dari pelaksanaan program penyuluhan pertanian multimedia, maka harus terungkapkan responsnya terhadap setiap unsur dari sepuluh unsur teknologi tersebut. Karena pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan faktor biaya, waktu, dan tenaga maka studi ini tidak diarahkan untuk meneliti respons petani terhadap kesepuluh unsur teknologi produksi pola Supra Insus tersebut, tetapi hanya akan dibatasi dan dipusatkan kepada satu unsur saja, yaitu respons petani terhadap

pengendalian hama secara terpadu (PHT). Inilah yang dijadikan masalah utama dalam penelitian ini. PHT sebagai salah satu unsur dari sepuluh unsur teknologi pola Supra Insus mempunyai 12 cara, yaitu (1) mengatur waktu penanaman padi; (2) menanam varietas tahan hama; (3) menanam secara serempak; (4) menyiangi rerumputan di petakan dan di pematang ; (5) memberantas tikus dengan menggunakan emposan dan cara lainnya; (6) memanfaatkan musuh hama yang alami; (7) menggunakan pestisida; (8) membabat jerami setelah panen; (9) membakar jerami yang telah dibabat; (10) menggenangi petakan dengan segera setelah jerami dibakar; (11) menggilir varietas antar musim tanam; dan (12) melaksanakan pola tanam tahunan dengan pola padi-padi-palawija (BIP Jawa Barat, 1987: 13-15). Cara (2), (11), dan (12) dari PHT ini merupakan unsur (1), (9), dan (10) dari teknologi produksi pola Supra Insus. Karena itu PHT pada dasarnya mengandung empat unsur teknologi produksi pola Supra Insus. Respons petani terhadap PHT merupakan responsnya terhadap setiap unsur PHT.

### C. Alasan Pemilihan Masalah

Respons petani terhadap PHT dipilih dan dijadikan masalah utama dalam penelitian ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ini.

Pertama, rendahnya kemampuan para petani dalam menerapkan unsur-unsur PHT, betapapun tinggi kemampuannya dalam menerapkan sembilan unsur lainnya dari teknologi produksi pola Supra Insus, membuka peluang munculnya serangan

hama yang secara ekonomis akan merugikan para petani itu sendiri. Karena itu respons petani terhadap PHT perlu ditelaah secara lebih mendalam.

Kedua, fakta empirik menunjukkan bahwa tanaman padi peserta Supra Insus di daerah Opsus Jalur Pantura pada musim gadu 1988 sebagian besar terserang hama penyakit penggerek batang sehingga produksi per hektar hanya mencapai sekitar 10 kuintal gabah kering panen, bahkan ada petani-petani yang hanya memperoleh 2 kuintal gabah kering panen. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena para petani mengabaikan terhadap cara-cara PHT. Oleh sebab itu penelitian perlu diarahkan kepada masalah respons petani terhadap PHT.

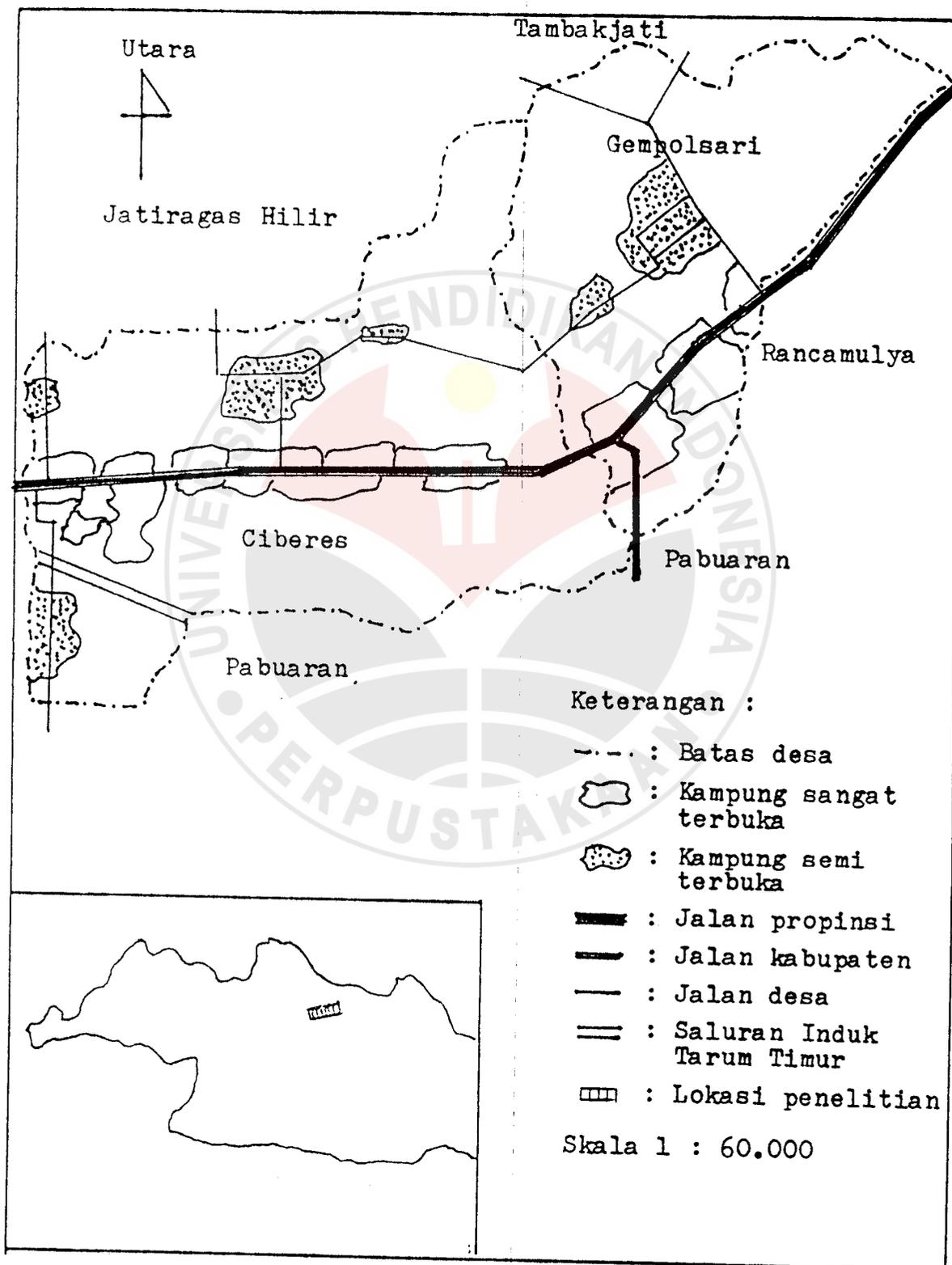
Ketiga, penerapan PHT tidak bersifat individual tetapi lebih menuntut pada kerjasama antar petani minimal dalam satu kelompok tani dan menuntut pula adanya keseragaman pelaksanaan dalam areal sawah yang relatif luas. Cara seperti ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Karena itu penerapan PHT secara individual mungkin saja terjadi sehingga membuka peluang untuk datangnya serangan hama. Hal ini memberi indikasi bahwa betapa pentingnya untuk menemukan data tentang bagaimana respons petani terhadap PHT.

#### D. Daerah Lingkup Penelitian

Peserta penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di daerah Opsus Jalur Pantura, sebagai -

Gambar 1.1

Peta Desa Ciberes dan Gempolsari Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat



mana sudah dijelaskan dalam bagian A, adalah para petani warga kelompok tani yang ada di kabupaten Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Penelitian ini tidak dilakukan di enam kabupaten ini, tetapi dibatasi hanya di dua desa saja yang ada di kecamatan Patokbeusi kabupaten Subang, yaitu desa Ciberes dan Gempolsari. Letak kedua desa ini, yang dijadikan lokasi penelitian, dapat dilihat dalam Gambar 1.1. Dipilihnya kedua desa ini sebagai daerah lingkup penelitian didasarkan kepada dua kriteria, yaitu desa yang dilalui oleh jalan raya propinsi dan semua tanah sawah yang ada di desa tersebut terairi oleh pengairan Jatiluhur.

Kecamatan Patokbeusi terdiri dari 10 desa, yaitu desa Tanjunggrasa Kidul, Tanjunggrasa Kaler, Jatiragas, Tambakjati, Ciberes, Gempolsari, Ranca Jaya, Ranca Mulya, Ranca Bango, dan Ranca Asih. Dari kesepuluh desa ini yang dilalui oleh jalan raya propinsi Jakarta - Cirebon adalah desa Tanjunggrasa Kaler, Ciberes, Gempolsari, dan Ranca Jaya. Tetapi tanah sawah yang ada di desa Tanjunggrasa Kaler sebagian terairi oleh pengairan Cilamaya sedangkan tanah sawah yang ada di desa Ranca Jaya sebagian bersifat tadah hujan. Tanah sawah yang ada di desa Tanjunggrasa Kidul seluruhnya hanya terairi oleh pengairan Cilamaya. Tanah sawah yang ada di desa Ranca Mulya, Ranca Bango, dan Ranca Asih sebagian bersifat tadah hujan. Ada empat desa yang tanah sawahnya seluruhnya terairi oleh pengairan

Jatiluhur, yaitu desa Ciberes, Gempolsari, Jatiragas, dan Tambakjati. Tetapi kedua desa yang terakhir ini tidak dilalui oleh jalan raya propinsi. Dari kesepuluh desa yang ada di kecamatan Patokbeusi kabupaten Subang yang dilalui oleh jalan raya propinsi dan yang keseluruhan tanah-tanah sawahnya terairi oleh pengairan Jatiluhur hanya ada dua desa, yaitu desa Ciberes dan Gempolsari.

Penetapan kriteria lokasi penelitian "desa yang dilalui oleh jalan raya propinsi" didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat praktis. Penelitian ini dilakukan dengan dana, tenaga, dan waktu yang terbatas. Ketiga faktor ini akan lebih hemat jika penelitian dilakukan di desa yang dilalui oleh jalan raya propinsi ketimbang di desa yang tidak dilalui oleh jalan raya tersebut. Transportasi dan komunikasi di desa penelitian seperti itu dapat dilakukan relatif lebih lancar.

Dasar pertimbangan dari kriteria lokasi penelitian "desa yang seluruh tanah sawahnya terairi oleh pengairan Jatiluhur" berkaitan dengan petani warga kelompok tani sebagai sasaran dari program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus, termasuk di dalamnya teknologi PHT. Program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus diluncurkan kepada para petani yang tanah sawah yang digarapnya terairi oleh pengairan Jatiluhur secara teratur, baik pada musim rendeng maupun pada musim gadu. Karena itu tidak memadai jika lokasi penelitian di -

pilih desa yang sebagian tanah sawahnya bersifat tadah hujan.

#### E. Identifikasi dan Alasan Pemilihan Variabel

Masalah utama yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah respons petani terhadap PHT pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus. Respons petani terhadap PHT diartikan sebagai perubahan perilaku nyata petani dalam mempraktekkan unsur-unsur atau cara-cara pengendalian hama secara terpadu (PHT). Perwujudan respons petani terhadap PHT ini dalam perbaikan dan peningkatan usaha taninya akan tampak dalam perilaku nyatanya, yaitu belum melakukan dan sudah melakukan untuk mempraktekkan unsur-unsur PHT. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi atau menjelaskan respons petani terhadap PHT pada para petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus yang ada di desa Ciberes dan Gempolsari? Jawaban atas pertanyaan ini dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Faktor-faktor yang dipandang ikut menjelaskan atau mempengaruhi respons petani terhadap PHT dapat ditinjau dari pandangan beberapa teori, di antaranya teori perilaku, teori komunikasi, dan teori belajar orang dewasa. Teori perilaku yang diketengahkan oleh Edward E. Sampson (1976) menyatakan bahwa perilaku individu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan faktor-faktor situasional.

Faktor-faktor situasional yang ikut menentukan perilaku individu, menurut Sampson, di antaranya adalah faktor ekologis, faktor teknologis, dan faktor status (peran) sosial. Keadaan alam tempat tinggal seseorang, baik keadaan geografik maupun keadaan iklimnya, mempengaruhi gaya hidup dan perilakunya. Kehadiran teknologi komunikasi, seperti radio dan televisi, mempengaruhi pula terhadap perilaku pendengar dan penontonnya. Perilaku seseorang dalam suatu sistem sosial ikut pula ditata oleh status sosialnya. Oleh karena itu dengan berpijak pada teori Sampson ini, dan juga teori-teori para ahli lainnya yang akan dijelaskan dalam Bab II, diperkirakan bahwa faktor frekuensi mendengarkan dan menyaksikan penyuluhan pertanian dari radio dan televisi yang dilakukan oleh petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus dipandang masing-masing sebagai salah satu faktor yang ikut menjelaskan atau mempengaruhi responsnya terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT). Diduga pula bahwa daerah atau kampung tempat tinggal petani dan status bertani-nya ikut pula mempengaruhi terhadap responsnya kepada PHT.

Menurut teori komunikasi, perubahan perilaku komunikate dipengaruhi oleh faktor komunikator, pesan, saluran, konteks, dan komunikate itu sendiri (Sutaryat Trisnamansah, 1984<sup>b</sup>:87). Dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus yang menjadi komunikator adalah para penyuluh pertanian. Pesan adalah informasi

tentang semua unsur teknologi produksi pola Supra Insus, termasuk di dalamnya PHT. Saluran adalah media massa (radio, televisi, surat kabar), media khusus (pengumuman, brosur), dan antar pribadi. Konteks adalah keadaan yang berkaitan dengan faktor fisik, situasional, sosial, dan kultural petani yang menjadi komunikate. Komunikate adalah petani itu sendiri dengan segala karakteristik yang dimilikinya. Pelaksanaan program penyuluhan pertanian ini dilakukan dalam bentuk komunikasi massa, komunikasi kelompok, dan komunikasi antar pribadi melalui pertemuan kelompok tani. Dengan berpijak pada teori komunikasi maka diduga bahwa faktor frekuensi mendengarkan, menyaksikan, dan menghadiri penyuluhan pertanian dari radio, televisi, dan PPL yang dilakukan petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus, masing-masing merupakan faktor yang ikut menjelaskan atau mempengaruhi responsnya terhadap PHT. Karena konteks dalam komunikasi ikut pula mempengaruhi perilaku komunikate maka diperkirakan pula bahwa faktor tempat tinggal dan faktor status bertani para petani ikut pula menjelaskan responsnya terhadap PHT.

Teori belajar orang dewasa di antaranya menyatakan bahwa setiap orang dewasa mempunyai pandangan untuk segera menerapkan apa yang dipelajarinya. Mereka terlibat dalam kegiatan belajar sebagian besar karena adanya respons terhadap apa yang dirasakan dalam kehidupannya sekarang. Hasil belajar yang diperolehnya dari program pendidikan yang

diikutinya dapat mengubah persepsi, sikap, dan perilakunya. Dengan mengikuti program pendidikan luar sekolah maka orang dewasa yang semula belum mau melaksanakan suatu cara yang baru kemudian berubah mau melakukannya. Berdasarkan kepada teori ini maka diperkirakan bahwa keikutsertaan dalam program latihan pengendalian hama secara terpadu (PHT) yang dilakukan petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus dipandang sebagai salah satu faktor yang ikut pula mempengaruhi responsnya terhadap PHT.

Berdasarkan kepada uraian di atas maka dapatlah diidentifikasi beberapa variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen (terikat) sebagai variabel yang dipengaruhi, variabel independen (bebas) sebagai variabel yang mempengaruhi, dan variabel kontrol sebagai variabel yang mengontrol terhadap pengaruh dari variabel bebas kepada variabel terikat.

Yang menjadi variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah respons petani terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT). Yang dijadikan variabel independen (bebas) adalah (1) frekuensi mendengarkan penyuluhan pertanian dari radio; (2) frekuensi menyaksikan penyuluhan pertanian dari televisi; (3) frekuensi menghadiri penyuluhan pertanian dari PPL; dan (4) keikutsertaan dalam latihan PHT. Sedangkan yang dijadikan sebagai variabel kontrol adalah derajat keterbukaan kampung dan status bertani para petani.

Ini tidak berarti bahwa di luar variabel tersebut tidak ada variabel lain yang dapat menjelaskan respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT).

Variabel-variabel penelitian di atas dipilih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi perkembangan desa yang dijadikan lokasi penelitian, yaitu desa Ciberes dan desa Gempolsari. Kedua desa ini dinilai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat sebagai desa swasembada (Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Barat, 1988:143) dan penjelasannya lebih lanjut disajikan dalam Bab IV bagian A. Desa swasembada adalah desa yang telah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, administrasi desa telah terselenggara dengan baik, dan LKMD telah berfungsi dalam mengorganisasikan dan menggerakkan peranserta masyarakat dalam pembangunan desa secara terpadu (Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Barat, 1989:94). Desa yang sudah mencapai tingkat perkembangan swasembada ini minimal telah memiliki lima faktor, yaitu (1) prakarsa hasil produksi yang merangsang; (2) teknik produksi selalu berubah sesuai dengan penemuan baru; (3) penyediaan peralatan; (4) komunikasi dan transportasi lancar; dan (5) fasilitas kredit serta fasilitas-fasilitas lainnya. Di samping itu desa yang swasembada mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : (1) adat tidak terlalu mengikat; (2) mulai ada pengaruh pembaharuan; (3) teknologi baru dalam pertanian cenderung dimanfaatkan sehingga hasil produksinya relatif tinggi; (4) penduduk yang melek huruf di atas 73,00%; (5) pemerintah desa dan lembaga

desa sudah berfungsi dengan baik; dan (6) prasarana desa sudah baik sehingga perhubungan dengan kota relatif menjadi lancar (Kansil, 1984:83).

Teknologi produksi pola Supra Insus, termasuk di dalamnya teknologi PHT, mulai diperkenalkan melalui penyuluhan pertanian multimedia sekitar pertengahan tahun 1987 yang diluncurkan kepada para petani warga kelompok tani di daerah Opsus Jalur Pantura di Jawa Barat, termasuk para petani di desa Ciberes dan Gempolsari. Jadi, teknologi PHT bagi para petani di kedua desa ini dipandang sebagai hal yang baru. Pengelolaan usaha tani mereka tanpa penerapan teknologi PHT ini memungkinkan munculnya serangan hama yang tidak dapat terkendalikan lagi. Jika hal ini terjadi maka sudah bisa dipastikan bahwa hasil produksi tanaman padi mereka terancam menurun, bahkan secara ekonomis akan merugikan mereka. Lebih jauh lagi hal ini akan mengganggu penyediaan stok beras di Jawa Barat, bahkan dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Karena itu jika para petani di kedua desa yang sudah sampai pada tingkat swasembada itu menilai penting terhadap teknologi PHT untuk mengelola usaha taninya maka akan tampak dalam bentuk responsnya terhadap teknologi PHT tersebut. Bagaimana respons terhadap teknologi PHT pada para petani di kedua desa ini akan terungkap melalui suatu kegiatan penelitian. Itulah sebabnya mengapa penelitian ini menentukan respons terhadap teknologi PHT sebagai variabel terikat (dependen).

Beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan untuk

memilih frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan latihan PHT sebagai variabel bebas (independen) dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Pertama, karena teknologi PHT merupakan hal yang baru maka keputusan petani untuk menentukan responsnya terhadap teknologi PHT akan banyak ditentukan oleh perolehan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam teknologi PHT tersebut, di samping berbagai faktor lainnya, yang didapatnya melalui kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukannya. Peluang yang terbesar untuk memperoleh ketiga hal tersebut adalah dengan cara mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT yang sengaja diluncurkan oleh pemerintah kepada masyarakat petani. Kedua, di desa Ciberes dan Gempolsari sudah ada radio, televisi, dan PPL yang memungkinkan para petaninya dapat mengikuti program penyuluhan pertanian melalui media-media tersebut. Ketiga, di kedua desa ini para petani sudah tergabung dalam wadah kelompok-kelompok tani yang akan menggerakkan mereka untuk belajar dengan cara mengikuti program penyuluhan pertanian multimedia. Keempat, pemerintahan desa dan LKMD di kedua desa ini dinilai berkemampuan untuk memotivasi kelompok-kelompok tani agar mengikuti program penyuluhan pertanian multimedia. Kelima, sifat-sifat keswasembadaan dari kedua desa ini memungkinkan para petaninya terangsang untuk mengikuti program penyuluhan pertanian multimedia, di antaranya melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT.

Dipilihnya keterbukaan kampung dan status bertani

sebagai variabel kontrol didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini. Para petani di kedua desa ini bertempat tinggal di kampung-kampung yang secara geografik bersifat sangat terbuka (dilalui jalan propinsi) dan semi terbuka (hanya dilalui jalan desa saja). Di samping itu sekitar 69,00% dari mereka berstatus sebagai petani pemilik dan sekitar 31,00% berstatus sebagai petani pemaro/penggarap. Kedua faktor atau variabel yang telah ditentukan ini diperkirakan akan ikut menjelaskan bukan saja responsnya terhadap teknologi PHT (variabel terikat) melainkan juga kegiatannya dalam mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT (variabel bebas). Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh dari kedua variabel kontrol ini terhadap variabel bebas dan terhadap variabel terikat maka keduanya perlu diteliti dan ditelaah secara lebih mendalam. Ini tidak berarti tidak ada faktor lain yang dapat dijadikan variabel kontrol untuk mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dipilih dalam penelitian ini.

#### F. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol, sebagaimana ditetapkan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

Pertama, adakah asosiasi yang berarti antara variabel keterbukaan kampung dengan masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, tele -

visi, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan latihan pengendalian hama secara terpadu (PHT) dikontrol oleh variabel status bertani pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan Gempolsari ?

Kedua, adakah asosiasi yang berarti antara variabel status bertani dengan masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan latihan pengendalian hama secara terpadu (PHT) dikontrol oleh variabel keterbukaan kampung pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan Gempolsari ?

Ketiga, adakah asosiasi yang berarti antara variabel keterbukaan kampung dengan variabel respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT) dikontrol oleh variabel status bertani dan antara variabel status bertani dengan variabel respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT) dikontrol oleh variabel keterbukaan kampung pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan Gempolsari ?

Keempat, adakah asosiasi yang berarti antara masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, penyuluh pertanian lapangan (PPL), dan latihan pengendalian hama secara terpadu (PHT)

dengan respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT) dikontrol oleh variabel keterbukaan kampung maupun oleh variabel status bertani pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan Gempolsari ?

#### G. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT) pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan Gempolsari. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) untuk memperoleh gambaran tentang sifat, arah, dan kekuatan asosiasi antara variabel keterbukaan kampung dengan masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT dikontrol oleh variabel status bertani; (2) untuk memperoleh gambaran tentang sifat, arah, dan kekuatan asosiasi antara variabel status bertani dengan masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT dikontrol oleh variabel keterbukaan kampung; (3) untuk memperoleh gambaran tentang sifat, arah, dan kekuatan asosiasi antara masing-masing variabel keterbukaan kampung dan status bertani dengan variabel respons terhadap PHT dikontrol oleh variabel status bertani dan keterbukaan kampung; dan (4) untuk mendapatkan gambaran tentang sifat, arah, dan kekuatan asosiasi

antara masing-masing variabel frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio, televisi, PPL, dan latihan PHT dengan respons terhadap PHT dikontrol baik oleh variabel keterbukaan kampung maupun oleh variabel status petani. Keempat tujuan khusus ini berlaku khusus hanya pada petani warga kelompok tani peserta program penyuluhan pertanian teknologi produksi pola Supra Insus di desa Ciberes dan desa Gempolsari.

#### H. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Praktis. Pendidikan luar sekolah dalam bentuk kegiatan penyuluhan pertanian teknologi Supra Insus, termasuk di dalamnya teknologi PHT, merupakan kegiatan yang baru di daerah Opsus Jalur Pantura Jawa Barat karena teknologi tersebut mulai diperkenalkan sekitar pertengahan tahun 1987. Karena itu penelitian ini yang memusatkan pada respons terhadap teknologi PHT dipandang tepat waktunya. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan strategi pelaksanaan program penyuluhan pertanian di lapangan. Di samping itu hasil ini diharapkan bermanfaat pula untuk instansi-instansi pemerintah yang memiliki bidang tugas mengembangkan masyarakat petani dalam rangka menyusun program-program pendidikan luar sekolah yang diluncurkan kepada mereka. Ada kecenderungan kuat bahwa para petani itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kemampuan responsnya terhadap suatu program.

Signifikansi Teoritik. Hasil penelitian ini diharap-

kan akan berguna untuk membuktikan kembali dan menunjang teori perilaku, teori komunikasi, teori belajar orang dewasa, konsep orbitasi daerah, dan konsep status serta penemuan-penemuan penelitian terdahulu. Kegunaan ini harus ditilik dari dimensi pengelolaan kelompok belajar pada pendidikan luar sekolah.

### I. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahan penafsiran dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dirumuskan tentang batasan dari setiap istilah yang dimaksud. Batasan dari setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini rumusannya sebagai berikut ini.

Respons adalah perubahan perilaku nyata sebagai akibat dari suatu stimulus atau situasi yang dihadapi. Respons terhadap pengendalian hama secara terpadu (PHT) adalah suatu perubahan perilaku nyata dalam bentuk melakukan tidaknya setiap cara PHT dalam mengelola usaha tani padi di sawah.

Pengendalian hama secara terpadu (PHT) adalah serangkaian tindakan yang merupakan paduan dari 12 cara PHT yang dilakukan mulai dari persemaian hingga selesai panen untuk mencegah munculnya serangan hama padi.

Petani adalah orang yang secara nyata memiliki atau menguasai tanah sawah lahan pertanian yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola tanah sawah tersebut secara sendiri atau bersama-sama dengan petani lainnya. Petani pemilik adalah pe-

tani yang secara nyata memiliki tanah sawah lahan pertanian yang mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan petani lainnya. Petani pemaro/penggarap adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah lahan pertanian tetapi mempunyai kekuasaan atas tanah sawah tersebut untuk mengelolanya, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan petani lainnya.

Kelompok tani adalah suatu kumpulan sejumlah petani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama yang berada di bawah pimpinan seorang kontak tani (Satuan Pengendali Bimas, 1982:28). Kontak tani adalah petani maju yang memiliki rasa tanggungjawab sosial, dinamika, prakarsa kemasyarakatan, dan sebagai penggerak pembaharuan teknologi pertanian bagi sesama petani, yang secara sukarela menjadi pendamping PPL dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan bagi warga kelompok taninya dan masyarakat sekitarnya.

Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah untuk para petani dan keluarganya dengan tujuan supaya mereka mampu, sanggup, dan bereswada memperbaiki, meningkatkan usaha taninya, dan selanjutnya pendapatan dan kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya (Badan Pengendali Bimas, 1977:13).

Teknologi produksi pola Supra Insug adalah teknologi produksi Paket D ditambah dengan penggunaan pupuk pelengkap cair (PPC) atau penggunaan zat pengatur tumbuh (ZPT), yang keseluruhannya berjumlah sepuluh unsur (rinciannya disebut-

kan dalam bagian A. di muka). Supra Insus adalah Insus yang disertai kerjasama antara kelompok tani pelaksana Insus dalam hamparan usaha tani yang lebih luas, yaitu minimum dalam satu unit petak tersier dalam satu wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) yang luasnya antara 600 sampai 1.000 hektar dan maksimum dalam satu wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) yang luasnya antara 15.000 sampai dengan 30.000 hektar. Insus adalah kegiatan intensifikasi berdasarkan kerjasama kelompok tani dalam satu hamparan usaha tani yang luasnya antara 15 sampai dengan 30 hektar (BIP Jawa Barat, 1987:2).

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam Kansil, 1984:25). Dalam studi ini yang dimaksud dengan desa adalah desa Cibe-res dan desa Gempolsari di kecamatan Patokbeusi kabupaten Subang.

Keterbukaan kampung adalah tingkat kelancaran perhubungan ke dalam dan ke luar kampung yang ditentukan oleh jenis jalan yang ada di kampung tersebut. Kampung sangat terbuka adalah kampung yang memiliki atau dilalui jalan raya propinsi sehingga sepanjang siang dan malam dipadati oleh arus kendaraan mobil umum. Kampung semi terbuka adalah kampung yang hanya memiliki jalan desa saja yang tidak dilalui

oleh kendaraan mobil umum, tetapi dapat dijangkau oleh kendaraan mobil.

Frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui radio adalah jumlah yang menunjukkan berapa kali mendengarkan penyuluhan pertanian teknologi Supra Insus dari radio melalui acara siaran pedesaan yang disiarkan oleh RRI atau Sturada dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui televisi adalah jumlah yang menunjukkan berapa kali menyaksikan penyuluhan pertanian teknologi Supra Insus dari televisi melalui acara "desa kita" atau "ragam desa" dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) adalah jumlah yang menunjukkan berapa kali menghadiri penyuluhan pertanian teknologi Supra Insus yang dikelola oleh PPL dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Frekuensi mengikuti program penyuluhan pertanian melalui latihan PHT adalah jumlah yang menunjukkan berapa kali pernah mengikuti latihan PHT yang diselenggarakan di desa setempat sejak dimulainya penyuluhan pertanian teknologi Supra Insus (pertengahan tahun 1987) sampai dengan Agustus 1988.

Istilah-istilah di atas termasuk dalam lingkup pandangan dari teori perilaku, teori komunikasi, dan teori belajar orang dewasa. Bagaimana pandangan dari teori-teori ini,

data empirik apa yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu, dan bagaimana jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan di muka, uraiannya secara rinci disajikan dalam Bab II berikut ini.

